Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Kamis, 12 Juni 2025

Siaran Pers

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III, Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:
http://ksap.dpr.go.id/

Twitter:
@bksapdprri

Instagram:
@bksapdpr

YouTube:
BKSAP DPR RI

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemennegara lain, baik secara bilateralmaupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

Delegasi DPR RI Dorong Pendekatan Seimbang dan Inklusif dalam Penanggulangan Narkotika di ASEAN

Pahang, Malaysia – Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berpartisipasi aktif dalam Pertemuan ke-8 AIPA *Advisory Council on Dangerous Drugs* (AIPACODD) yang berlangsung pada 11-12 Juni 2025 di Pahang, Malaysia. Delegasi dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian sidang, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama regional menghadapi tantangan narkotika dan kejahatan lintas negara. AIPACODD adalah salah satu pertemuan rutin di bawah AIPA yang menyediakan mekanisme konsultasi dan rekomendasi untuk lembaga eksekutif dan legislatif melakukan koordinasi yang lebih baik dalam memerangi permasalahan obat-obatan terlarang.

Pada hari pertama, dalam sesi Diskusi Panel, Himmatul Aliyah (Komisi X/ FP-Gerindra), menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi pengguna narkoba. “Dengan tantangan geografis yang luas, Indonesia menilai pendekatan berbasis komunitas sangat penting agar layanan rehabilitasi dapat menjangkau seluruh wilayah,” ujar Himmatul dalam diskusi bersama perwakilan UNODC, ASOD, NADA, dan Kementerian Kesehatan Malaysia. Ia juga menggarisbawahi perlunya pengawasan parlemen terhadap anggaran kebijakan narkotika secara menyeluruh, baik dari sisi penegakan hukum maupun layanan rehabilitasi.

Pada Agenda ke-2, Ravindra Airlangga (Wakil Ketua BKSAP/ Komisi IX/ FP-Golkar) menyampaikan *Country Progress Report* Indonesia. Setiap anggota AIPA menyampaikan *Country Progress Report* pada setiap pertemuan AIPACODD untuk melaporkan tindak lanjut, kemajuan, praktek baik penanganan permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang. Ravindra menekankan bahwa “Ancaman narkotika semakin kompleks dan canggih, terhubung dengan kejahatan lintas negara seperti kejahatan siber dan pencucian uang. Dibutuhkan respons lintas sektor dan kerja sama antar negara.” Dalam laporannya, Indonesia mencatat 46.747 kasus narkotika dengan 61.452 tersangka pada 2024, termasuk penyitaan lebih dari 7 ton sabu dan hampir 45 ton ganja.

Dalam agenda ke-3, yang membahas rencana pembentukan *Study Committee* untuk memperluas jangkauan AIPACODD untuk juga mencakup isu kejahatan transnasional, Adde Rosi Khoerunnisa (Komisi X/ FP-Golkar) menyampaikan bahwa, “Indonesia mendukung inisiatif ini sebagai bentuk pengakuan bahwa tantangan narkotika saat ini secara intrinsik tidak dapat dilepaskan dengan kejahatan lintas negara lainnya seperti perdagangan manusia dan kejahatan finansial,” ujarnya. Adde juga menekankan pentingnya *Study Committee* untuk membuka diri secara inklusif, memastikan masukan dari pemangku kepentingan dan ahli yang relevan.

Pada hari kedua, pertemuan membahas draf Resolusi mengenai Menyatukan Parlemen untuk ASEAN yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Menangani Tantangan Narkoba Kontemporer (*Uniting Parliament for An Inclusive and Sustainable Asean in Addressing Contemporary Drug Challenges*). Elpisina (Komisi XIII/ F-PKB) menyampaikan beberapa usulan amandemen Indonesia terhadap draf resolusi tersebut. Salah satu usulan utama yang disetujui secara aklamasi adalah ajakan kepada parlemen anggota AIPA untuk mendukung kebijakan pencegahan narkoba yang komprehensif, dengan memperkuat program pendidikan bahaya narkoba di sekolah, keluarga, dan komunitas. “Pencegahan berbasis komunitas adalah fondasi utama dalam membangun ketahanan generasi muda terhadap narkoba,” jelas Elpisina.

Pertemuan ini menegaskan pentingnya peran parlemen dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan narkotika yang seimbang dan berbasis bukti. Selain penyampaian progress report tahunan, perwakilan negara-negara AIPA juga berdiskusi aktif terkait isu terkini seperti penyalahgunaan zat psikoaktif baru (NPS), distribusi narkoba melalui platform digital, dan integrasi layanan rehabilitasi ke dalam sistem kesehatan nasional.

(*****)